# PERANCANGAN APLIKASI BERBASIS WEB KENAIKAN GAJI BERKALA PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

Zendy Robi Junianto<sup>1)</sup>, Ahmad Homaidi<sup>2)</sup>, Firman Santoso<sup>3)</sup>

Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibrahimy Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Situbondo 68374, Jawa Timur, Indonesia e-mail: zendyrobijunianto@gmail.com<sup>1)</sup>, ahmadhomaidi@ibrahimy.ac.id<sup>2)</sup>, firman4bi@gmail.com<sup>3)</sup>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bermaksud guna meningkatkan mutu kualitas layanan birokrasi selaku penggerak utama jalannya kebijakan pemerintah di Indonesia, dimana jalannya suatu roda pemerintahan yang mewujudkan good governance pastinya tidak terlepas dari tata kelola kepegawaian yang baik. Buat menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik diperlukan suatu sistem pelayanan yang terbangun dalam sesuatu aplikasi berbasis teknologi data, dengan harapan dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan penyederhanaan sistem yang hendak memudahkan pelayanan serta buat tingkatkan kualitas manajemen administrasi kepegawaian pada unit satuan kerja dinas PMPTSP kabupaten situbondo diperlukan suatu sistem digitalisasi yang sanggup menaruh informasi cocok kebutuhan dikala ini serta mempermudah dikala proses pencarian informasi secara kilat, pas serta efektif. Sehingga hendak terjalin kenaikan kinerja organisasi dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian semacam proses pemberkasan Peningkatan Pangkat, Peningkatan Pendapatan Berkala oleh hasil yang yang maksimal serta akuntabel serta pada kesimpulannya tercapai e- government. Oleh sebab itu dibutuhkan sesuatu aplikasi untuk membagikan pemecahan pada kasus tersebut. Dalam riset ini aplikasi yang hendak dirancang merupakan aplikasi Peningkatan Pendapatan Berkala pada unit satuan kerja dinas PMPTSP kabupaten situbondo, sehinggadapat dibesarkan lebih lanjut demi kepentingan lembaga bersamaan dengan pengembangan teknologi data yang terdapat.

Kata Kunci: Aplikasi Web, Kenaikan Gaji Berkala, PHP, Laravel, Mysql

#### **ABSTRACT**

This research aims to improve the quality of bureaucratic services as the main driver of government policy in Indonesia, where the running of a government that realizes good governance is certainly inseparable from good personnel management. To support the implementation of good governance, a service system is needed that is built on a data technology-based application, with the hope that in its implementation a system simplification can be implemented that will facilitate service and to improve the quality of personnel administration management in the Situbondo district PMPTSP service work unit. A system is needed digitalization which is able to store information according to current needs and facilitate the process of searching for information quickly, precisely and effectively. So that there will be an increase in organizational performance in carrying out personnel services such as the process of filing for promotion of rank, increasing periodic income with maximum and accountable results and ultimately achieving e-government. Therefore, an application is needed provide solutions in this case. This research of application to be designed is a Periodic Income Increase application for the Situbondo Regency PMPTSP work unit, so can be development further for benefit of institution along with the development existing data technology.

Keywords: Web Applications, Pay Increase Periodic, PHP, Laravel, Mysql

Diterima Redaksi :23 Juli 2024 | Selesai Revisi : 22 September 2024 | Diterbitkan Online : 15 Oktober 2024

#### I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Era reformasi birokrasi pada pelaksanaan pemerintahan diharapkan tentu membawa jalannya roda pemerintahan ke arah yang lebih baik. Pada era sekarang, pelayanan yang baik kepada masyarakat, transparansi pelaksanaan pemerintahan, integritas pelayan masyarakat menjadi bahasan yang sering muncul dalam perbincangan perihal pemerintahan. Konsep good governance, hingga partisipasi menjadi hal yang ditonjolkan dalam visi, misi maupun rencana strategis daerah. Namun pada pelaksanaannya tidak jarang ditemukan keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengatakan pelayanan kepada masyarakat kurang baik, kurang memuaskan dan tak jarang mengecewakan.

Beranjak dari fenomena guna diatas. memperbaiki kualitas mutulayanan birokrasi sebagai penggerak utama jalannya kebijakan pemerintahan di Indonesia, Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara hadir sebagai solusi alternatif. Undang-Undang ini dilahirkan dengan tujuan agar Sistem Pemerintahan Negara Indonesia mempunyai sebuah sistem birokrasi dengan SDM nya yang berkualitas. Dimana salah satu sisi yang ingin dibenahi melalui hadirnya aturan tersebut adalah peningkatan kualitas aparatur Pegawai Negeri Sipil, yang dimana Aparatur Sipil Negara merupakan penggerak roda pemerintahan di daerah maupun di pusat.

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negeri, bisa dimengerti kalau faktor birokrasi maupun pemerintahan ialah pegawai Aparatur Sipil Negeri, dalam penerapan tugas pokok serta gunanya bersumber pada pada kinerja, dimana jalannya suatu roda pemerintahan yang mewujudkan good governance pastinya tidak terlepas dari tata kelola kepegawaian yang baik. Buat menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik diperlukan suatu sistem pelayanan yang terbangun dalam sesuatu aplikasi berbasis teknologi data, dengan harapan dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan penyederhanaan sistem yang hendak memudahkan pelayanan serta diperoleh hasil yang yang maksimal serta akuntabel serta padaakhirnya tercapai e- government[1].

Taat dalam administrasi manajemen kepegawaian pada DPMPTSP Kabupaten Situbondo dilaksanakan selaku salah satu pemenuhan terhadap tugas serta guna setia Aparatur Sipil Negeri. Dalam penerapannya, dokumen kepegawaian belum terdatakan dengan memakai sistem digitalisasi, perihal ini diakibatkan sistem digitalisasi belum terdapat buat penuhi kebutuhan penyimpanan dokumen pegawai. Dikala ini data-data pegawai tersebut masih dalam wujud kertas ditaruh dalam suatu map, yang kala informasi tersebut diperlukan buat proses urusan kepegawaian, bagian kepegawaian masih wajib membolak balikkan map serta mencari satu persatu pesan keputusan ataupun informasi yang diperlukan tersebut. Perihal ini menimbulkan proses pencarian informasi/ dokumen kepegawaian jadi lama, rentan rusak, terselip, tertukar ataupun apalagi lenyap.

Buat tingkatkan kualitas manajemen administrasi kepegawaian pada **DPMPTSP** Kabupaten Situbondo diperlukan suatu sistem digitalisasi yang sanggup menaruh informasi cocok kebutuhan dikala ini serta mempermudah dikala proses pencarian informasi secara kilat, pas serta efektif. Sehingga hendak terjalin kenaikan kinerja organisasi dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian semacam proses pemberkasan Peningkatan Pangkat, Peningkatan Pendapatan Berkala ataupun pemberkasan Pensiun.

Dari pemaparan permasalahan diatas," SiKebut" Sistem Data Kepegawaian Blueboat dibentuk buat menolong proses pengolahan informasi kepegawaian serta Peningkatan Pendapatan Berkala yang terus meningkat serta terus menjadi menumpuk dengan pergantian yang lumayan siginifikan tiap tahunnya, pengembangan ini dirancang selaku sesuatu pemecahan buat menolong proses pengarsipan informasi kepegawaian selaku pendukung proses peningkatan pendapatan berkala yang sepanjang ini diolah dalam wujud hardcopy (kertas) yang wajib sediakan tempat ataupun lemari arsip yang lumayan besar.

## 1.2. Tinjauan Penelitian

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Sukri Adrianto dalam jurnal "Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Menggunakan Pemrograman Web Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai". Penelitian ini menyoroti masalah kenaikan gaji berkala yang masih mengalami kendala dalam menemukan arsip-arsip kepegawaian yang akan melakukan proses KGB, serta lamanya proses dengan menggunakan langkah yang masih dibilang manual.[2]

Penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan perancangan aplikasi berbasis web kenaikan gaji berkala. Dimana kedua penelitian ini merumuskan pemecahan masalah tentang arsip kepegawaian serta lambatnya proses pengajuan kenaikan gaji berkala. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi berbasis web sangat cocok untuk membantu unit kerja untuk mengelolah arsip digital kepegawaian serta mempercepat proses pengajuan kenaikan gaji berkala.

#### 1.3. Landasan Teori

#### a. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah integrasi beberapa komponen yang sudah dianalisa dan diproses sehingga mampu menghasilkan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan suatu keputusan.[3]

# b. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi Berbasis Web adalah pemrograman yang telah tersimpan pada server kemudian dikirim menggunakan internet dan dapat diakses melalui antar muka atau interface berupa web browser seperti google chrome pada umumnya.[4]

# c. Perancangan Basis Data

Perancangan Basis data (Database) adalah suatu proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung rancangan sistem.[5]

# d. Laravel

Laravel adalah framework yang telah open source serta banyak pengguna dari tahun ke tahun. Sejak diluncurkannya pada tahun 2011, aplikasi yang telah<sub>1</sub>. dibangun berbasis Laravel ini sangat digandrumi oleh banyak programmer. Framework Laravel menyediakan banyak versi PHP library dan banyak pula fungsi yang dapat mempermudah guna penulisan pada baris kode program pada saat pembangunan aplikasi.[6]

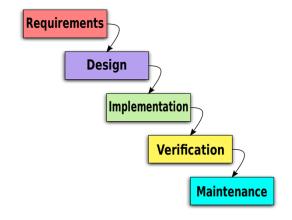
#### e. PHP

PHP adalah kimpulan kode atau bahasa program yang memiliki fungsi utama, yaitu mampu mengkoordinasikan dan mengevaluasi data atau bentuk apapun ke database server dan pada tahap berikutnya akan menciptakan hasil yang telah diinginkan.[7]

#### II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian metode yang digunakan ialah tata cara Waterfall. Metodologi pengembangan waterfall merupakan suatu tata cara pengembangan sistem dimana antar satu fase ke fase yang lain dicoba secara berentetan. Umumnya suatu langkah hendak dituntaskan terlebih dulu saat sebelum melanjutkan fase selanjutnya keuntungan memakai tata cara ini requirement wajib didefinisikan lebih mendalam saat sebelum proses coding dicoba. Disamping itu tata cara ini membolehkan sedikit bisa jadi pergantian yang dicoba oleh proyek berlangsung. Tetapi tata cara ini mempunyai sebagian kelemahan antara lain wajib komplit saat sebelum program diawali, dan bila terjalin fase yang dilewati, hingga bayaran yang hendak ditimbulkan cukup besar.

Gambar 1.



Tahapan- tahapan yang ada dalam tata cara waterfall merupakan selaku berikut:

Requirements Analysis pada proses ini dibutuhkan analisis pada sebuah kebutuhan sistem, serta pengumpulan beberapa data. Pada tahap ini bisa di lakukan menggunakan cara survey kepada pejabat pengelola kepegawaian pada Dinas PMPTSP Kabupaten Situbondo.

- 2. Design proses ini dirancang sebelum pengkodean, bertujuan agar memberikan gambaran kebutuhan proses serta gambaran bentuk form. Hasil dari design ini berbentuk rancang bangun yang terperinci dimana dapat sangat mudah dalam mewujudkan hal itu pada saat pemograman telah dilakukan.
- 3. Coding( Implementasi) merupakan proses pengkodean yang diimplementasikan dari proses desain kedalam bentuk kode baris oleh mesin pc dengan memakai bahasa pemrograman PHP.
- 4. Verification( verifikasi) Melaksanakan pengujian untuk mencoba kebenaran program yang telah dibuat. Pengujian ini memiliki titik tumpu pada logika program, serta memastikan bahwa seluruh statment telah sesuai serta membenarkan apakah hasil yang di idamkan telah tercapai ataupun belum.
- 5. Maintenance(Perawatan) Menanggulangi fitur lunak yang telah berakhir supaya bisa berjalan mudah serta dari gangguangangguan yang bisa menimbulkan kehancuran.

#### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Standar Operasional Prosedur

Berikut merupakan standar operasional prosedur dalam melakukan pengajuan dan penerbitan kenaikan gaji berkala. Dimana proses dilakukan oleh pejabat kepegawaian yang ada di unit satuan kerja dengan melihat tanggal penerbitan kenaikan gaji berkala sebelumnya apakah sudah mencapai 2 Tahun yang menjadi syarat utama dalam pengajuan ini.

Kemudian pejabat kepegawaian menginputkan data kenaikan gaji berkala sebelumnyab. Mempunyai hak atas data users; sebagai dasar dari perhitungan kenaikan berkala yangc. Mempunyai hak atas data pegawai; baru, setelah semua selesai terinput maka akan<sup>d</sup>. Mempunyai hak atas data berkas pegawai; muncul file draft SK yang baru untuk di periksa jika<sup>e</sup>. Mempunyai hak atas data kenaikan gaji berkala; dirasa telah sesuai maka proses akan dilanjutkan<sup>2</sup>. Kepala Dinas kepada kepala dinas untuk dilakukan penanda<sup>a</sup>. Mempunyai hak melihat atas data pegawai; tanganan terhadap file SK tersebut. Pada tahapb. Mempunyai hak melihat data pegawai; selanjutnya sistem akan memberitahukan kepadac. Mempunyai hak penandatanganan pengajuan data pegawai yang bersangkutan melalui whatsapp bahwa pengajuan kenaikan gaji berkalanya telah selesai dan<sup>3</sup>. Pegawai dapat didownload melalui sistem.

Gambar 2.



No.	Kegistan	Polakuana		Mutu Baku			
		Pemahox	DPMPTSP	Kelengkapun	Waletin	Output	Ket.
1	Penyampaian Permasalahan	<b>P</b>		Dokumen pendukung/bukti permasalahan	20 Menit	Permasalahun diterima	
2	Identifikasi Permanalahan			Permanalahan diterima	15 Menit	Hak akses OSS atau SIPINTER	
3	Melakukun pengecekun pada akun di system OSS atau SIPINTER		¢	«Komputer on «Jaringan internet «Hak aluses	20 Menit	Saran dan masukan	
4	Penyampaian hasil pengeceluan beserta saran dan masukan	Ditolak	r i	Sarun dan masukan	15 Menit	Saren den maeukan tereampeikan	
5	Pertinbangan dikembalikan ke pemohon	<b>~</b>		Saran dan masukan tersampaikan	20 Menit	Keputuaan Ya atau Tidak ataa saran dan masukan	
6	Perbalkan data Pensohon	Diterra	<b>→</b> □	Keputusan Pemohan	5 Menit	Data di Perbalki	
7	Permanalahan selesai	<u></u>		Data di Perbelici	5 Menit	•NIB •SIP •OPD Teknis •Serufikat Standar/Isin	

## 3.2 Diagram Konteks (Context Diagram)

Diagram konteks adalah kumpulan dari suatu proses yang menggambarkan ruang lingkup sebuah sistem. Diagram konteks ialah level tertinggi dari DFD yang dapat menggambarkan keseluruhan input kedalam sebuah sistem atau output dari sebuah sistem serta memberi gambaran tentang keseluruhan alur sistem. Sistem ini dibatasi oleh bourndary atau disebut kuga gambar dengan garis putus-putus. Pada diagram konteks ini hanya terdapat satu proses, tidak diperbolehkan sebuah store didalam diagram konteks.

Berikut merupakan Context Diagram pada sistem kenaikan gaji berkala sebagai berikut :

1. Pejabat Kepegawaian

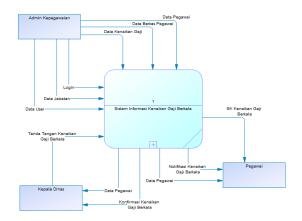
akan<sup>a</sup>. Mempunyai hak atas data jabatan;

kenaikan gaji berkala;

- a. Mempunyai hak view atas data pribadi pegawai;
- b. Mempunyai hak view atas data file pribadi berkas pegawai;

c. Mempunyai hak data atas pengajuan data kenaikan gaji berkala pribadi yang telah selesai;

#### Gambar 3.

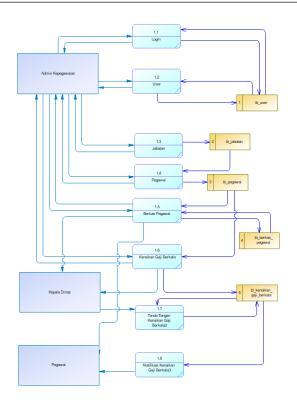


# 3.3 Data Flow Diagram

Berikut merupakan Data Flow Diagram pada sistem kenaikan gaji berkala sebagai berikut :

- 1. Pejabat Kepegawaian
- a. Melakukan input data jabatan;
- b. Melakukan input data users;
- c. Melakukan input data pegawai;
- d. Melakukan upload berkas pegawai;
- e. Melakukan input data kenaikan gaji berkala;
- 2. Kepala Dinas
- a. Melihat data pegawai;
- b. Melihat file berkas pegawai;
- c. Menandatangani pengajuan data kenaikan gaji berkala;
- 3. Pegawai
- a. Melihat data pribadi pegawai;
- b. Melihat file pribadi berkas pegawai;
- c. Mendapatkan notifikasi atas pengajuan data kenaikan gaji berkala yang telah selesai;

Gambar 4.

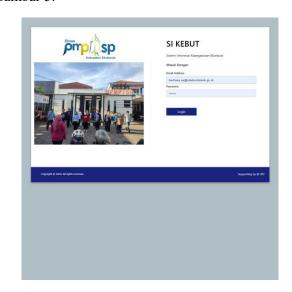


#### IV. IMPLEMENTASI PROGRAM

# 4.1 Halaman Login

Halaman ini merupakan halaman utama saat aplikasi di akses oleh pegawai unit satuan kerja. Halaman ini digunakan untuk semua user masuk kedalam sistem menggunakan email dan password masing-masing dengan hak akses tersendiri yang telah diatur.

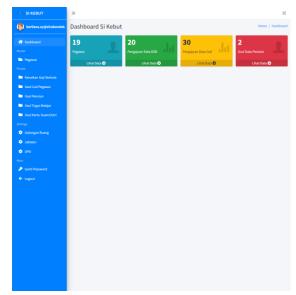
### Gambar 5.



#### 4.2 Halaman Dashboard

Halaman ini merupakan halaman utama setelah malakukan login oleh pegawai unit satuan kerja. Halaman ini menginformasikan kepada user terkait info jumlah pegawai, jumlah data kenaikan gaji berkala, dan info lainnya.

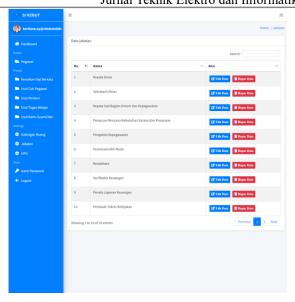
## Gambar 6.



#### 4.3 Halaman Form Jabatan

Halaman ini merupakan halaman master untuk menambahkan jabatan, mengubah jabatan maupun menghapus jabatan. Menu ini diberikan agar mendukung kedinamisan data dimana untuk mengikuti peraturan pemerintah yang dirasa sangat flexible sehingga admin dapat menyesuaikan dengan aturan yang ada.

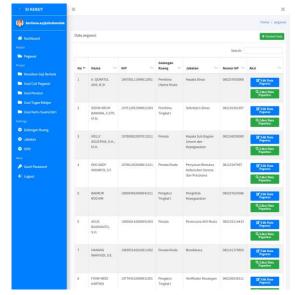
Gambar 7.



#### 4.4 Halaman Form Users

Halaman ini merupakan halaman master untuk menambahkan user, mengubah user maupun menghapus user. Menu ini diberikan agar admin dapat mengatur siapa yang mendapatkan akses untuk mengakses user serta hak akses pada menu yang terdapat di sistem.

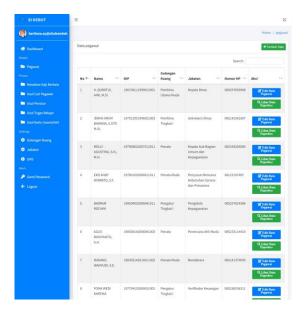
#### Gambar 8.



# 4.5 Halaman Form Pegawai

Halaman ini merupakan halaman master untuk menambahkan pegawai, mengubah pegawai maupun menghapus pegawai. Menu ini diberikan agar admin dapat menyesuaikan data kepegawaian yang ada dengan berkas-berkas yang telah dimiliki oleh pegawai yang ada.

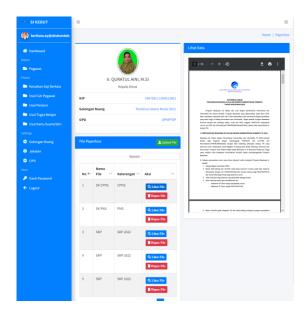
# Gambar 9.



# 4.6 Halaman Form Paperless

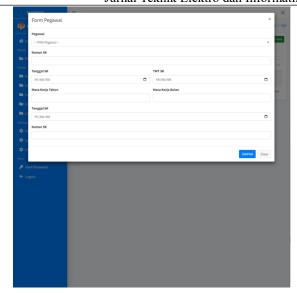
Halaman ini merupakan halaman untuk admin dapat mengunggah file yang dimiliki oleh setiap pegawai sebagai arsip digital.

# Gambar 10.



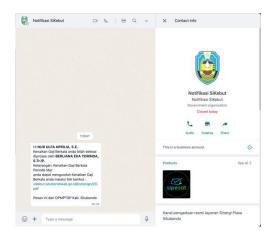
# 4.7 Halaman Form Pengajuan KGB

Halaman ini merupakan halaman untuk menambahkan pengajuan baru yang dilakukan oleh pegawai melalui admin kepegawian.



# 4.8 Notifikasi Whatsapp

Notifikasi akan dikirimkan melalui whatsapp kepada pegawai yang bersangkutan bahwa pengajuan kenaikan gaji berkala yang telah diajukan pada tahap selesai ditanda tangani dan dapat diunduh melalui link sematan pada pesan.



# 4.9 Cetakan Bertandatangan Digital Bersertifikasi BSSN

SK kenaikan gaji berkala dapat didownload oleh admin kepegawaian dan pegawai yang bersangkutan. Dimana file pdf tersebut adalah file sah yang telah tertanda tangan digilan bersertifikasi BSSN.



#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 KESIMPULAN

Penelitian ini telah dilakukan dengan sangat cermat serta menganalisis sistem proses pengelolaan dan pengolahan data kepegawaian yang telah diproses serta dilandasi oleh banyak tinjauan yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini. Sehingga penulis menyimpulkan agar dapat mewajibkban untuk menerapkan proses yang tersistem melalui komputer dengan sebuah aplikasi berbasis web sebagai transisi dari yang sebelumnya masih manual. Maka berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pencarian data pegawai cukup mengisikan Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan begitu admin kepegawaian tidak perlu menginput keseluruhan data pegawai, karena telah diambil di database master kepegawaian sehingga penginputan menjadi lebih mudah.
- Untuk memproses ataupun mencari sebuah informasi kepegawaian akan dengan sangat mudah dengan mengetik data di form pencarian.
- 3. Cepat serta dapat sangat mudah dalam memproses pengajuan kenaikan gaji berkala.
- 4. Proses penandatanganan telah terintegrasi dengan sistem BSSN sehingga dapat ditandatangani secara digital.
- 5. Memberikan notifikasi pada setiap proses penandatanganan berkas melalui whatsapp.

#### 4.2 SARAN

Dari implementasi Perancangan Aplikasi Berbasis Web Kenaikan Gaji berkala ini penulis berharap agar unit kerja dapat menggunakan aplikasi guna mengolah data arsip digital kepegawaian maupun pengajuan kenaikan gaji berkala.

# **REFERENSI**

- [1] R. Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara," 2023. Accessed: Oct. 30, 2023. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/26947 0/uu-no-20-tahun-2023
- [2] S. Adrianto, "APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI," *I N F O R M A T I K A*, vol. 13, no. 1, p. 32, Jun. 2021, doi: 10.36723/juri.v13i1.254.
- [3] Fithrie Soufitri, *Konsep Sistem Informasi*, vol. 3. 2023.
- [4] coursehero, Pengertaian Aplikasi Berbasis Web O'Brien. 2020.
- [5] Setiyowato and S. Siswanti, *Perancangan Basis Data*. 2021.
- [6] Y. Yudhanto, Mudah Menguasai Framework Laravel - Yudho Yudhanto dan Helmi Adi Prasetyo. 2019.
- [7] M. Mundzir, "Buku Sakti Pemrograman Web Seri PHP," 2020.